

BAB 1

PENDAHULUAN

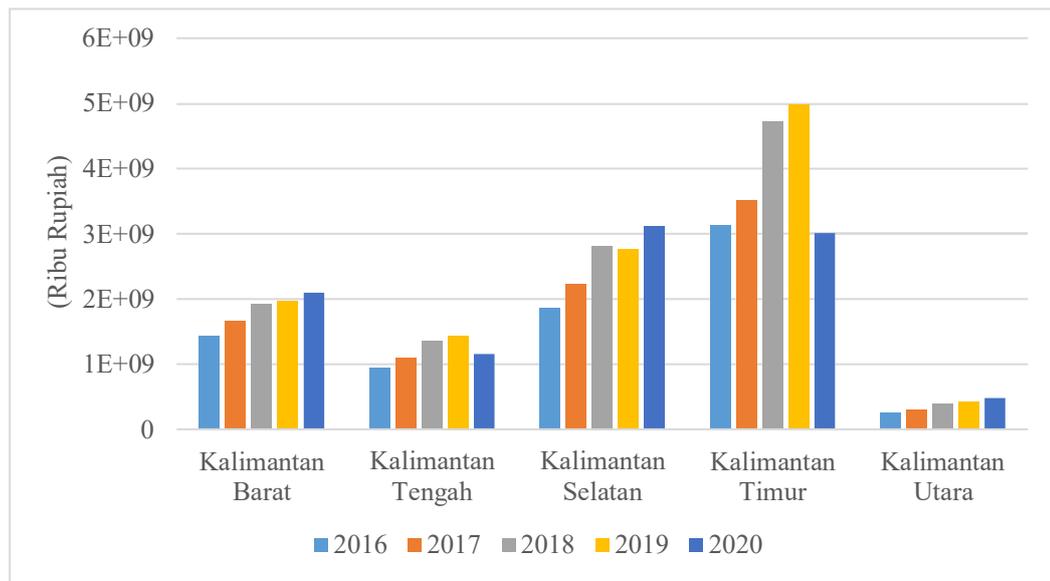
I.1 Latar Belakang

Pajak sebagai salah satu instrument paling efektif dalam menetapkan kebijakan fiskal dan dapat mendorong kontribusi para rakyat terhadap Negara. Berbagai aspek mulai dari aspek ekonomi pajak dapat didorong untuk menggerakkan ekonomi yang dapat berperan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan bernegara, pajak memegang peranan penting, salah satunya yaitu dalam pelaksanaan dalam segi pembangunan, because the majority of the state's sources of funding are used to support development expenses. Contoh dalam pengeluaran pembangunan yaitu, fungsi stabilitas, fungsi anggaran, fungsi pengaturan, dan fungsi retribusi pendapatan. (Rukmini.B, 2017).

Kalimantan Timur direncanakan akan menjadi provinsi baru untuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Provinsi Kalimantan Timur Panajem Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Rencana pemindahan Ibukota Negara tersebut dapat berdampak baik bagi perekonomian daerah. Provinsi Kalimantan Barat memiliki penduduk paling banyak pada Pulau Kalimantan. Banyaknya penduduk di Provinsi Kalimantan Timur terbilang rendah. Berdasarkan teori Musgrave (1989), tinggi rendahnya penerimaan di sektor pajak bergantung pada banyaknya penduduk. Peningkatan migrasi penduduk yang di akibatkan oleh pemindahan IbuKota Negara (IKN) memiliki dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah. Pada saat kurun waktu 2016 sampai 2020, Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan penerima pajak yang paling tinggi di Pulau Kalimantan. Ada beberapa contoh pengaruh positif terhadap penerimaan panjak, yang pertama adanya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jika PDRB meningkat akan berpebgaruh pada potensi kenaikan penerimaan pajak daerah. Dan yang kedua, belanja modal yang mana dapat digambarkan melalui penyediaan prasarana dan juga sarana public yang dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak akan semakin tinggi.

Berikut grafik yang menunjukkan bahwa, Provinsi Kalimantan timur memiliki penerimaan pajak daerah paling tinggi di Pulau Kalimantan :

Grafik 1. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi di Pulau Kalimantan 2016-2020

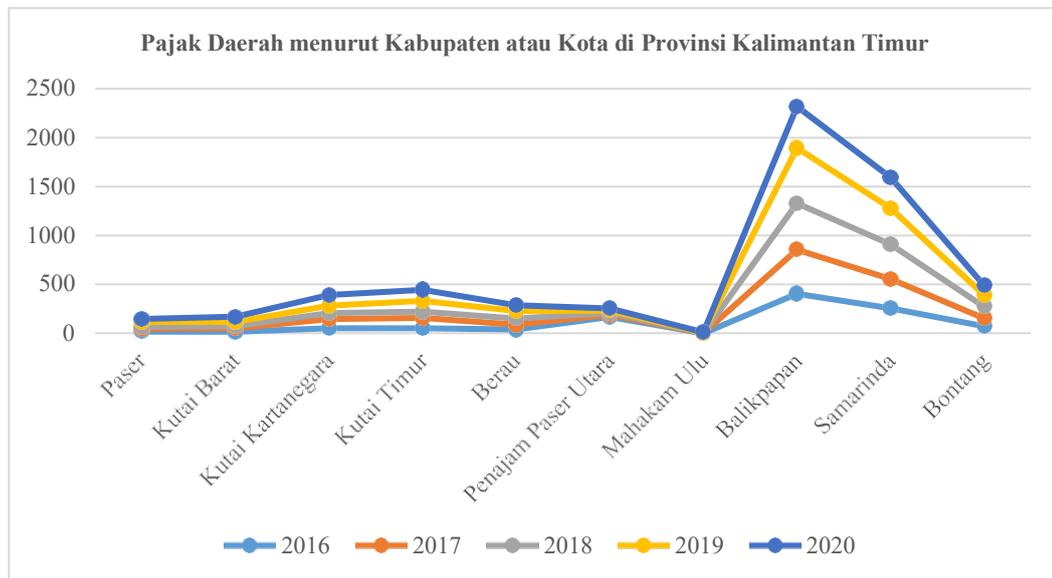


Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2020

Pada Grafik 1, Salah satu provinsi di Pulau Kalimantan adalah Kalimantan Timur yang merupakan penghasil penerimaan pajak daerah terbesar. Tiga pajak yang paling banyak mendatangkan uang di tahun 2019 adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak kendaraan bermotor (PKB), yang totalnya mencapai Rp. 301,78 M dan Rp. Grafik harga partisipasi bunga 208 M. Karena pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah—keduanya sedang booming—terkait erat dengan kenaikan pajak, hal ini dapat berdampak pada perkembangan pajak yang efektif seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat.

Kalimantan Timur memiliki memiliki 7 kabupaten dan 3 kota yang masing-masing memiliki penerimaan pajak daerah yang berbeda terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020



Sumber: *djpk.kemenkeu 2020*

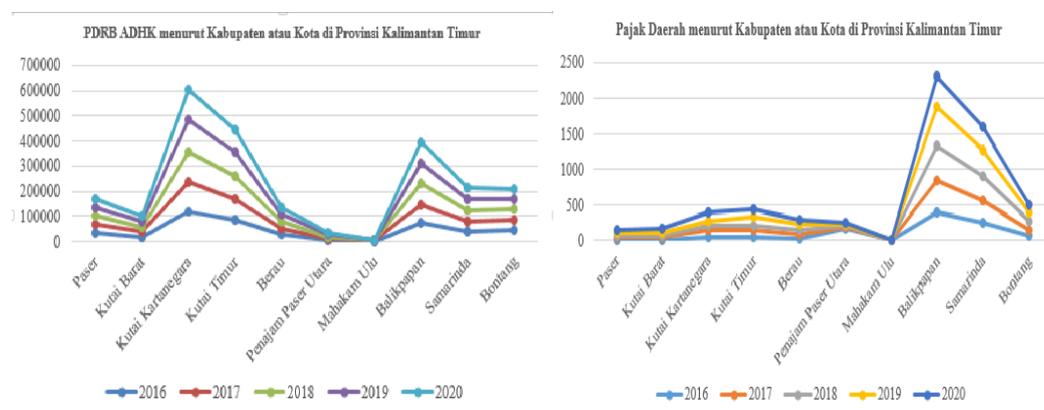
Pendapatan per kapita merupakan ukuran tingkat penerimaan pajak, dan keduanya tidak dapat dipisahkan dari tingkat pendapatan suatu daerah. Seperti yang dapat dilihat dari grafik 2, besaran pajak daerah yang dipungut di setiap kota atau kabupaten di provinsi Kalimantan Timur akhir-akhir ini mengalami perubahan.

Kota Balikpapan yang memberikan kontribusi pajak terbesar mampu melampaui target APBD pada tahun 2019. Realisasi yang dicapai pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 631 miliar, di atas Rp. target 501 miliar. Kota Balikpapan mampu memberikan kontribusi pajak restoran yang dimaksudkan untuk mengumpulkan Rp. 89 miliar tetapi malah mengumpulkan Rp. 102 miliar, pajak hotel yang dimaksudkan untuk mengumpulkan Rp. 41 miliar tetapi malah mengumpulkan Rp. 45 miliar, pajak hiburan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan Rp. 24 miliar tetapi malah mengumpulkan Rp. 25 miliar, pajak penerangan jalan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan Rp. 119 miliar tetapi malah mengumpulkan Rp. 122 miliar, pajak reklame dimaksudkan untuk mengumpulkan Rp. 9 miliar. Karena masalah pemindahan Ibukota Negara, uang pajak dapat terus direalisasikan (IKN).

Menurut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemungutan pajak daerah secara keseluruhan pada tahun 2020 sebesar Rp. 2,46 T yaitu 64,36 persen dari target Rp. 1,97 T atau 80,30% dari total realisasi pajak daerah. Namun, Kota Samarinda India memiliki proporsi capaian terbesar yang terealisasi 120,56 persen. Jika pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dikecualikan dari perhitungan pajak daerah, Kota Balikpapan merupakan mayoritas basis pajak daerah (Kementerian Keuangan, 2020). Pajak penerangan jalan Rp 121,4 miliar, pajak bumi dan bangunan Rp 99,77 miliar untuk pedesaan dan perkotaan, BPHTB Rp 77,50 miliar, pajak parkir Rp 12,69 miliar, dan pungutan pajak lainnya akan menjadi mayoritas pajak daerah di kota Balikpapan periode 2020.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh dalam tingginya penerimaan pajak. Kinerja pembangunan ekonomi dapat tergambar dari PDRB dalam waktu tertentu, dan pastinya membuat perekonomian kearah yang lebih jelas. PDRB ADHK dipergunakan guna membuktikan perkembangan ekonomi dengan cara keseluruhan dari tahun yang lalu ke tahun yang akan datang. Kenaikan PDRB dapat mengukur pertumbuhan ekonomi. Tingginya kenaikan PDRB suatu wilayah, maka mengakibatkan tingginya juga potensi sumber pendapatan wilayah tersebut (Thamrin, 2001). Pada Provinsi Kalimantan Timur laju fluktuatif PDRB cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut dapat dilihat pada grafik 3 sebagai berikut :

Grafik 3. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kalimantan Timur 2020 dan djpk.kemenkeu 2020

Pada grafik 3, peningkatan dan penurunan PDRB di Provinsi Kalimantan Timur pada masing-masing Kabupaten atau Kota menunjukkan tren positif di tahun 2016-2019, namun laju peningkatan PDRB dapat dikatakan cukup lambat hanya kurang dari 5%, dan besaran jumlah PDRB masing-masing wilayah juga berbeda. Terjadi penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020, saat terjadinya wabah pandemic Covid 19 di seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang mengakibatkan lemahnya beberapa sektor perekonomian. Peningkatan dan penurunan PDRB di 10 Kabupaten/Kota dipengaruhi oleh berbagai faktor perekonomian dan karakteristik pada masing-masing daerah.

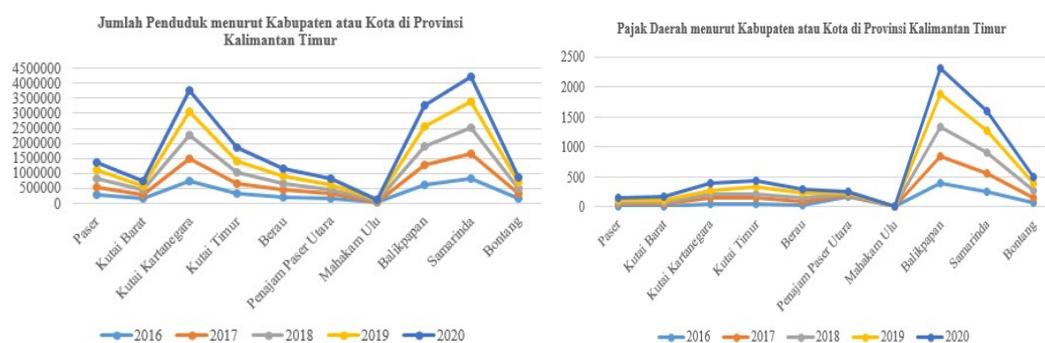
Pada tahun 2016, peningkatan PDRB pada Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh dua kabupaten dan satu kota, yakni kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 25,02 persen, Kabupaten Kutai Timur sebesar 18,62 persen, dan kota Balikpapan sebesar 15,69. Pada tahun 2020, yang menjadi kontributor terbesar perekonomian Kalimantan Timur yakni Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 24,46 persen. Kontribusi Kabupaten Kutai Timur mengalami peningkatan sebesar 19,00 persen. Sementara kontribusi Kota Balikpapan juga mengalami peningkatan menjadi 17,00 persen. Covid 19 berakibat kontraksi pertumbuhan di Kalimantan Timur sebesar 2,85 persen pada tahun 2020. Kabupaten atau Kota yang mengalami kontraksi pada tahun 2020 yakni Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 4,44 persen dan Kabupaten Berau sebesar 3,35 persen. Pada tahun 2016, Kabupaten atau Kota tidak ada yang masuk kelompok yang memiliki daerah maju dan cepat tumbuh. Akan tetapi, pada tahun 2020, Kota Bontang berhasil mendapatkannya, dimana pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapitanya tinggi. Pada tahun 2016 ada 3 Kabupaten atau Kota yang masuk daerah ke dalam potensial yaitu Kota Samarinda, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kota Balikpapan,. Namun pada tahun 2020 Kabupaten/Kota yang masuk daerah potensial bertambah menjadi 5 wilayah, yakni Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Panajem Paser Utara dan Kabupaten Paser. (BPS, 2021)

Penerimaan pajak daerah di beberapa Kabupaten/Kota Provinsi seperti Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kartanegara, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Paser Utara, ditahun 2018 mengalami fluktuasi yang cenderung menurun, hal ini berdasarkan data yang berbanding terbalik dengan

teori Solow dan Swan. Jika melihat teori, faktor-faktor produksi terutama akumulasi modal masuk kedalam pajak daerah. Hasil berupa barang dan jasa akan meningkat jika pajak yang diterima semakin tinggi, namun berdasarkan data pajak daerah di berbagai kabupaten/kota cenderung turun sedangkan PDRB kabupaten atau kota meningkat setiap tahunnya. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sebagian kegiatan ekonomi di daerah PDRB yang dibayarkan oleh wajib pajak yang terdaftar di luar provinsi lain menjadi penyebab tragedi ini. Selain itu, kewajiban perpajakan tahun berjalan digunakan untuk menutupi kerugian yang dialami dunia usaha selama dua tahun terakhir yang mengalami kontraksi ekonomi, yang berdampak pada penurunan jumlah wajib pajak. 2018 (Kementerian Keuangan). Kota Bontang mengalami sejumlah perubahan, antara lain penurunan Produk Domestik Regional Bruto pada tahun 2018, meskipun ada juga kenaikan pajak daerah di sana. Hal ini menunjukkan bahwa teori dan data aktual tidak sama.

Musgrave (1993) mengemukakan bahwa adanya fluktuasi dalam penerimaan pajak dapat bergantung pada banyaknya penduduk dan pendapatan perkapita. Banyaknya penduduk dapat mempengaruhi proses suatu pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah. Bila sesuatu wilayah mempunyai jumlah penduduk yang besar sehingga cara pembangunan wilayah itu bisa berjalan lebih cepat, sebaliknya bila sesuatu wilayah mempunyai jumlah penduduk yang sedikit sehingga kemajuan wilayah itu berjalan lebih lambat. Semakin cepat pembangunan di sesuatu wilayah sehingga dapat memperbesar pula pendapatan pajak daerah, sebab masyarakat mengenali kalau pendapatan pajak wilayah hendak dipakai untuk membiayai kebijakan serta pembangunan wilayah di masa yang akan datang.

Grafik 3. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur 2016-2020



Dimas Bagus Mahasinul Akbar, 2022

PENGARUH PDRB, JUMLAH PENDUDUK, INVESTASI DAN BELAJA MODAL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan
www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

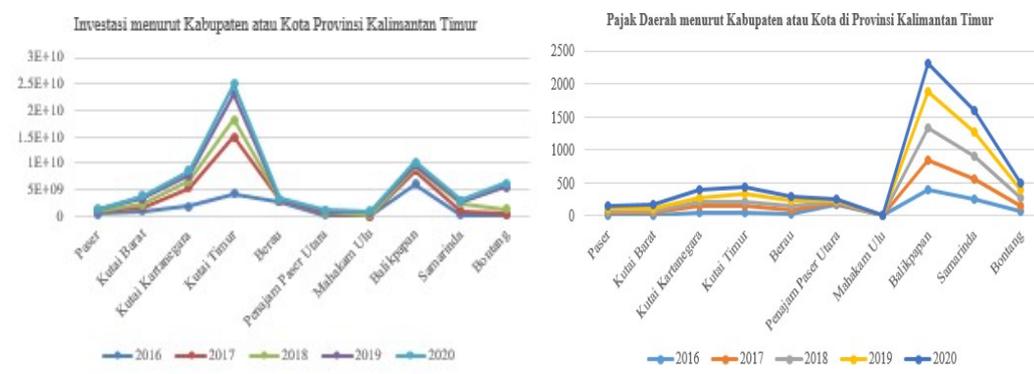
Sumber: BPS Kalimantan Timur 2020 dan djpk.kemenkeu 2020

Pada grafik 4, di tahun 2020 tercatat bahwa sebaran penduduk di Kalimantan Timur lebih berfokus pada Kota Samarinda dengan total penduduk 827.994 jiwa atau bisa dikatakan 21,99 persen dari penduduk di Provinsi Kalimantan Timur. Dan yang terbesar kedua ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan total 729,380 jiwa, yaitu sebesar 19,37 persen. Daerah selanjutnya dari segi jumlah penduduk adalah Kabupaten Kutai Timur yang memiliki jumlah penduduk sebesar 434.459 jiwa atau 11,54 persen, diikuti oleh Kabupaten Paser yang memiliki jumlah penduduk sebesar 275.452 jiwa atau 7,31 persen, disusul Kabupaten Berau yang memiliki jumlah penduduk sebesar 248.035 jiwa atau 6,59 persen. Kemudian Kabupaten Penajam Paser Utara yang berpenduduk 4,74 persen, Kabupaten Kutai Barat yang berpenduduk 172, Samarinda merupakan Kota yang memiliki penduduk paling banyak di Provinsi Kalimantan Timur dengan total sebesar 827,768 jiwa pada tahun 2020. Selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 729.380 jiwa. Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit, mengingat Kabupaten Mahakam Ulu merupakan Kabupaten yang paling akhir terbentuk (BPS,2020). Jumlah masyarakat yang per tahun sering mengalami pertumbuhan di Kab atau Kota Provinsi Kalimantan Timur. Banyaknya penduduk tidak selalu menambahkan pendapatan pajak daerah. Bila dibanding pada grafik 2, dengan jumlah masyarakat yang semakin bertambah semestinya sesuai dengan pendapatan pajak daerah. Berdasarkan data pada tahun 2018 terdapat gap yang terjadi pada Kabupaten Penajem Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur, jumlah penduduk pada Kabupaten tersebut terus mengalami kenaikan, namun penerimaan pajak menurun. Saat tahun 2019 terdapat gap yang terjadi di Kota Bontang berdasarkan data, kota tersebut mengalami kenaikan jumlah penduduk namun penerimaan pajak menurun, satu tahun mendatang tahun 2020 terjadi pada Kabupaten Penajem Paser Utara, Terdapat selisih antara kota Balikpapan dan Bontang berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten/Kota tahun 2020, namun penerimaan pajak mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh penduduk setempat yang tidak produktif yang tidak dapat mendukung pemerintah karena sulit bagi mereka untuk

mendapatkan pekerjaan (Hakib et al, 2020).

Gagasan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur akan menarik minat investor. Kemampuan masyarakat untuk meningkatkan daya beli, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja—yang semuanya pada akhirnya akan mempengaruhi kemampuan keuangan suatu daerah—dapat diuntungkan dari penerimaan pajak dari investasi (Batik, K, 2013).

Grafik 5. Realisasi modal Investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kalimantan Timur 2020 dan *djpk.kemenkeu 2020*

Berdasarkan grafik 5, realisasi investasi turun 11,90% pada tahun 2020 menjadi Rp. 31,38 T dari Rp. 35,62 T pada tahun 2019. Sebanyak 1.666 proyek di seluruh Kabupaten/Kota di Kaltim mendapat tambahan realisasi investasi pada tahun 2020, sehingga realisasi PMDN menjadi Rp. 7.30 T. Kota Balikpapan menerima investasi terbesar pada tahun 2020 mencapai Rp. 4,29 T atau 58,79% dari total realisasi investasi PMDN. Kabupaten Kutai Kartanegara menempati posisi kedua dengan menyumbang Rp. 608,39 M atau 8,34% dari total investasi PMDN, dan Kabupaten Kutai Barat berada di urutan ketiga dengan kontribusi Rp 5.116,03 M atau 7,07%. Kabupaten Kutai Timur menjadi penyerap tenaga kerja tertinggi dengan jumlah 2,271 orang di Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya pada Kota Balikpapan sebanyak 1.769 orang, kemudian pada Kota Samarinda sebanyak 417 orang. Total penyerapan tenaga kerja Indonesia dan Asing pada tahun 2020 tercatat sebanyak 5.440 orang (DPMPTSP, 2020).

Realisasi PMA pada tahun 2020 mencapai Rp. 931,3 miliar, Seluruh Kabupaten atau Kota di Kalimantan Timur di tahun 2020 mendapat realisasi PMA

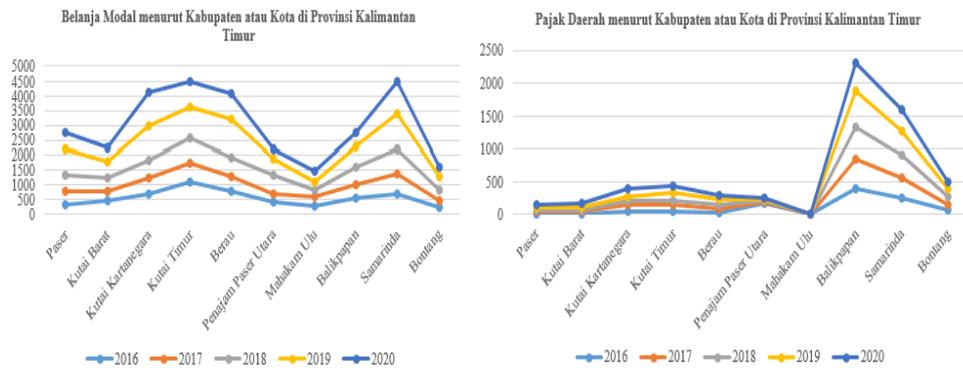
dengan total proyek yang dikerjakan sebanyak 227 dan mencapai Rp. 931,3 miliar, dengan mendapatkan tambahan realisasi investasi sesuai dengan sebaran lokasi di seluruh Kabupaten atau Kota. Jumlah Investasi paling besar mencapai Rp. 356,24 M dan berada di Kabupaten Kutai Timur. Investasi terbesar kedua adalah Rp. 341,84 miliar di Kota Balikpapan dan Rp. 93,14 M di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kota Samarinda yang menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 752 orang untuk proyek PMA terbesar, disusul Kota Balikpapan yang menyerap 153 orang, dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyerap 141 orang.

Berdasarkan grafik 5, pajak daerah pada tahun 2018 di beberapa Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan seperti di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan data investasi yang justru mengalami peningkatan. Hal tersebut karena pada sisi penyerapan tenaga kerja yang diakibatkan oleh adanya investasi tercatat pada tahun 2018 di Kabupaten Kutai Barat sebanyak 30 (TKI dan TKA) orang yang terbilang rendah, sedangkan pada Kabupaten Kutai Timur sebanyak 1.728 orang dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 1.446 orang angka tersebut terbilang tinggi, akan tetapi tingginya penyerapan tenaga kerja yang mengakibatkan bertambahnya wajib pajak tidak selalu patuh terhadap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berupa pajak

Kemampuan suatu daerah dalam membuat kebijakan mengenai peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, berpengaruh kepada daya tarik terhadap investasi dan dapat menciptakan keberhasilan di suatu daerah. Belanja modal pada umumnya di alokasikan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan prasarana dan juga sarana publik, sehingga dalam pembangunan fasilitas publik dapat di nikmati oleh masyarakat dan akan mencapai kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Untuk meningkatkan pengalokasian belanja modal, diperlukan pembiayaan yang dipungut oleh pemerintah. Pajak daerah menjadi salah satunya, pajak daerah adalah bagian dari faktor penerimaan daerah yang bias menggambarkan tingkat kemandirian daerah. Semakin tingginya jumlah pajak maka dapat dikatakan daerah tersebut mampu mewujudkan desentralisasi fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan bisa meningkatkan anggaran belanja modal yang disebabkan peningkatan

pajak daerah, hal ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kepada masyarakat serta meningkatkan kemandirian daerah.

Grafik 6. Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020



Sumber: djpk.kemenkeu 2020

Pada grafik 6, Biaya pegawai yang mencapai 62,50% pada tahun 2019 dan 2018, biaya bantuan keuangan yang mencapai 53,02%, dan biaya bunga yang mencapai 50,75% merupakan sumber dari tingginya tingkat penyerapan, sedangkan belanja modal dilakukan dengan tarif yang lebih rendah. dibanding tahun sebelumnya. Kabupaten Kutai Timur memiliki kinerja realisasi belanja tertinggi sepanjang periode pelaporan, tercatat sebesar 68,94%. Kabupaten Mahakam Ulu dengan total 32,87% memiliki daerah serapan pengeluaran terendah. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2018 yang mencapai 35,20% dan 41,23%, terjadi sedikit penurunan (Kemenkeu, 2020).

Berdasarkan grafik 6, pada tahun 2017 belanja modal di Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Balikpapan, Berau, Penajam Paser Utara dan Bontang, Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Timur tersebut cenderung menurun dalam hal belanja modal. Penurunan tersebut disebabkan oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memprioritaskan belanja pegawai dan barang sambil mengurangi belanja modal, serta penurunan besaran APBD sebagai akibat dari pengurangan Dana Transfer ke Daerah (Kementerian Keuangan, 2017). Berdasarkan statistik pajak daerah di kota atau kabupaten, terdapat gap tahun 2017 yang tumbuh dan seharusnya berpengaruh pada pertumbuhan belanja modal mengingat pajak merupakan sumber belanja pemerintah dalam belanja modal.

Seperti halnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2020, belanja modal di berbagai kabupaten atau kota cenderung menurun. Akibat kendala masyarakat akibat pandemi Covid 19, pembangunan infrastruktur terhambat, yang juga berkontribusi terhadap penurunan APBD pemerintah daerah (Kementerian Keuangan, 2020). Pemerintah harus menyisihkan uang untuk pengeluaran yang lebih besar atau lebih penting yang dapat memengaruhi penerimaan pajak, dengan penekanan khusus pada layanan publik dan pembangunan infrastruktur (Kementerian Keuangan, 2019).

Terdapat gap pada tahun 2020 yang berdasarkan data pajak daerah pada Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur mengalami kenaikan akan tetapi belanja modal turun.

Pajak daerah dapat dimaksimalkan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah salah satunya dengan menggali berbagai potensi. Faktor-faktor seperti PDRB, Jumlah Penduduk, Investasi dan Belanja Modal dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

I.2 Perumusan Masalah

Pajak adalah salah satu kontributor terbesar untuk sumber pendapatan negara dan daerah. Penerimaan pajak daerah akan terus diupayakan agar dapat ditingkatkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk yang meningkatkan pada jumlah penyector pajak pada daerah tersebut. Meningkatnya PDRB pada suatu wilayah dapat mencerminkan tingkat ekonomi pada wilayah tersebut. Luas area perkebunan yang meningkat akan mengakibatkan tingginya penerimaan pajak yang dihasilkan.

Berdasarkan latar belakang yang ada dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian itu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Timur ?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Timur ?
3. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap penerimaan Pajak Daerah di Provinsi

Kalimantan Timur ?

4. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Timur ?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah, maka dari itu tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis pengaruh PDRB terhadap Penerimaan Pajak daerah
2. Untuk mengetahui analisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap penerimaan Pajak Daerah
3. Untuk mengetahui analisis pengaruh Investasi terhadap penerimaan Pajak Daerah
4. Untuk mengetahui analisis pengaruh Belanja Modal terhadap penerimaan Pajak Daerah

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat seperti :

1. Manfaat praktis
 - a. Sebagai informasi tentang hal yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Provinsi Kalimantan Selatan dan bahan kajian agar menjadi solusi dalam memecahkan masalah.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan jumlah pelanggan listrik terhadap penerimaan Pajak daerah.
 - c. Sebagai tambahan referensi bagi para peneliti.
2. Manfaat teoritis
Hasil dari penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penelitidalam hal pajak daerah